

Optimalisasi Peran Auditor Internal Melalui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Instansi Perwakilan BKKBN DIY

Vina Sopiani
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Email: vinasopi04@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on financial performance at BKKBN DIY Representatives, the role of internal auditors in optimizing Good Corporate Governance (GCG) at BKKBN DIY Representatives, and obstacles in optimizing Good Corporate Governance (GCG) at BKKBN DIY Representatives. Through descriptive qualitative research methods, by interviewing 5 employees who are a team of auditors, latbang, and treasurer expenditures and make observations. From the results of the research on the implementation of GCG at the BKKBN DIY Representative Office, it is optimal because it can minimize the occurrence of irregularities and make financial management easier, the role of auditors on financial performance is optimal because auditors always carry out their roles properly, namely as quality assurance and consultants, although there are still obstacles to optimizing. GCG but it can still be resolved.

Keywords: *Good Corporate Governance, Internal Auditor, Financial Performance.*

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

1. Pendahuluan

Era globalisasi seperti sekarang perubahan sangat cepat terjadi dimulai dari kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi, politik dunia, dan lainnya. Maka dari itu organisasi atau pemerintahan diharapkan meningkatkan kinerja eksternal maupun internalnya agar tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak kalah saing dengan negara asing. Juga harus dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini yang semakin modern dan menuntut sebuah organisasi tersebut harus bergerak mengikuti perubahan yang ada. Reformasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia. Atas dasar keinginan reformasi birokrasi itu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki proses birokrasi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Masyarakat menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai cara membentuk pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang benar dan pemahaman yang baik di instansi pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengelolaan yang sehat dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) harus diikuti dengan aparatur yang kompeten. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) adalah merupakan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan setara. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. BKKBN juga bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan. Perwakilan BKKBN DIY dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai maupun pimpinan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dilingkungan kerjanya masing-masing.

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan bersama-sama, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perwakilan BKKBN DIY juga telah melaksanakan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) hal ini menegaskan komitmen BKKBN sebagai lembaga negara yang konsisten dalam pencegahan terjadinya korupsi.

Auditor internal merupakan elemen monitoring dan struktur pengendalian internal dalam suatu organisasi baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan, yang dibuat untuk mengoptimalkan dalam memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya melalui *Good Corporate Governace* (GCG). Auditor internal menurut Tugiman (2006) adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang di laksanakan organisasi.

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

2. Tinjauan Pustaka

2.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Monks (2011) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan atau organisasi yang menentukan arah kinerja pada perusahaan atau organisasi. Menurut Kaen dan Shaw (2003) Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

2.2 Auditor Internal

Audit Internal adalah kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jasa konsultasi, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya (Zamzami, 2013). Audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi. Sehingga pada dasarnya auditor internal memiliki wewenang dalam memastikan seluruh proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan cara pelaksanaan audit yang berkelanjutan serta disisi lain perusahaan atau pemerintahan juga dapat merasakan manfaatnya.

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan dibidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011).

2.4 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah "Penduduk Tumbuh Seimbang 2015" dengan misi "mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera".

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, mewawancarai 5 orang karyawan yang merupakan tim auditor, latbang, dan bendahara pengeluaran serta melakukan observasi. Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BKKBN DIY untuk mengetahui bagaimana peran auditor mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan.

4. Hasil

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perwakilan BKKBN DIY sudah optimal karena dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan sangat berpengaruh dan mendukung terhadap pengelolaan keuangan sehingga menjadi lebih mudah. Peran auditor terhadap kinerja keuangan sudah optimal karena auditor menjalankan perannya dengan baik yaitu sebagai quality assurance, konsultan, pengawas, sebagai pendorong dan evaluator dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam mengoptimalkan GCG ada beberapa hambatan tetapi itu masih bisa diatasi oleh karyawan Perwakilan BKKBN DIY.

5. Pembahasan

5.1 Pedoman Dasar Penerapan

Perwakilan BKKBN DIY dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai maupun pimpinan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) secara efektif dilingkungan kerjanya masing-masing. Dimana wujud komitmen itu adalah dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) diantaranya adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan revidi intern. Untuk penerapan SPIP di Perwakilan BKKBN DIY mulai sejak tahun 2009, sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih diterapkannya ZIWBK di Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2012, dan juga merupakan salah satu dari 10 daerah percontohan yang diajukan untuk memperoleh predikat ZIWBK tahun 2019 dan mempresentasikan pembangunan ZIWBK dilingkungan Perwakilan BKKBN DIY dihadapan tim KEMENPAN RB. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP peraturannya sesuai dengan PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2008 sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menerbitkan PERMENPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

5.2. Implementasi GCG di Perwakilan BKKBN DIY

Pelaksanaan GCG di Perwakilan BKKBN DIY tidak terlepas dari prinsip-prinsipnya yaitu *transparency*, *independency*, *Responsibility*, *Accountability*, dan *fairness*. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/MMBU/2002 tentang lima penerapan praktek GCG. Auditor internal berfungsi untuk mengawasi jalannya instansi pemerintah dengan memastikan bahwa instansi tersebut telah melakukan praktik dalam penerapan prinsip GCG. Karena prinsip tersebut merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip mendasar yang penting yang harus diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari. Untuk melakukan pencegahan KKN pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Pope (2003) bahwa KKN menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, saat ini sudah menjadi masalah dunia yang harus di berantas dan harus ditanggulangi secara serius, serta sangat penting program *transparency* pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai. Perwakilan BKKBN DIY sudah menerapkan transparansi informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Nomor 178/PMK.05/2018 dan 196/PMK.05/2018 tentang peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran serta optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Di Instansi Perwakilan BKKBN sendiri untuk meningkatkan kinerja keuangan salah satunya dengan dilaksanakannya Rapat Pengendalian Program (RADALGRAM) itu tentang evaluasi pencapaian kegiatan dan penyerapan anggaran di bulan lalu, tujuannya agar mengetahui progres pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran setiap bulannya.

5.3 Program Kegiatan Auditor Untuk Menerapkan GCG

Kegiatan auditor untuk menerapkan GCG diantaranya :

1. Audit Kinerja
Menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
2. Audit Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Sesuai dengan pasal 48 PP 60/2008 tentang pengawasan intern dan Pasal 50 PP SPIP Tentang kinerja audit pengelolaan keuangan.
3. Audit Investigasi
Proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten untuk mengungkap fakta atau kejadian tentang korupsi.
4. Post Audit
Untuk menilai prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat telah dilaksanakan tepat, cepat, dan tanggap. Memastikan bahwa

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

pelaksanaan pengadaan bahan pangan bagi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengingat situasi Covid seperti sekarang.

5. Desk Audit
Mengaudit secara tidak langsung dengan memanfaatkan data yang dapat diakses langsung dari kantor internal audit, seperti data *online*.
6. Uji Petik Kabupaten/Kota
Pengontrolan/pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten.
7. SPIP
Melakukan pembinaan/bimbingan kepada Instansi Pemerintah agar menerapkan SPIP.
8. ZIWBK
Mewujudkan ZIWBK dan WBBM khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Pendampingan Laporan LHKPN dan LHKASN
Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan itu akan di periksa langsung oleh KPK setiap tahun nya, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) akan diperiksa oleh KEMENPAN RB.
10. Konsultan dan Quality Assurance bidang
Sebagai penasihat atau orang-orang kepercayaan di suatu instansi yang bertugas memastikan bahwa hasil audit yang diberikan berkualitas.
11. Diklat Kompetensi Auditor
Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.4 Peran Auditor Internal di Perwakilan BKKBN untuk Menerapkan GCG

Peran auditor sebagai *quality assurance* artinya setiap langkah kegiatan audit yang dilakukan akan bermuara pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen audit akan merasa puas apabila produk jasa audit yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Elliot (1993) penjamin kualitas/*quality assurance* adalah seluruh rencana atau tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Audit internal sebagai konsultan dalam suatu organisasi agar setiap permasalahan yang ada di komponen-komponen auditor bisa menjadi pendamping untuk memberikan solusi, dan diharapkan dapat memberi manfaat berupa nasehat (*advice*). Ketika proses sudah berjalan auditor melakukan pengawasan baik dari aset maupun jalannya operasional instansi sehari-hari terutama dari aspek pengendalian kontrol dan pemeriksaan karena itu sebagai pencegahan awal agar tidak ada yang melenceng dari aturan. Auditor sebagai pendorong untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan juga sekaligus sebagai evaluator. Menurut teori keagenan/*agency theory* bahwa principal disebut juga evaluator informasi, yang diasumsikan harus bertanggung jawab atas pilihannya sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia.

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

5.5 Hambatan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perwakilan BKKBN DIY

Dalam setiap penerapan kebijakan di instansi ataupun perusahaan tidak lepas dari yang namanya hambatan diantaranya:

1. Komunikasi dan Koordinasi
Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain maka komunikasi verbal ataupun non verbal antar individu maupun kelompok sangat penting, karena dengan berkomunikasi kita dapat menyampaikan ide, pesan, dan terbentuknya pendapat umum dalam suatu instansi dan dapat terjalinnya suatu komitmen yang baik. Komunikasi juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman sehingga selalu terjalin hubungan baik dan tercapainya sebuah tujuan.
2. Komitmen
Berkomitmen tinggi dalam organisasi atau instansi harus dengan dukungan karena organisasi atau instansi yang mendukung kesejahteraan pegawainya cenderung menumbuhkan loyalitas pegawai yang lebih tinggi, memiliki kepercayaan kepada pegawai bahwa dengan bekerja sama akan membuahkan hasil yang baik pada saat situasi yang berisiko.
3. Kurang Membaca Peraturan
Perlu adanya kesadaran diri untuk membiasakan budaya membaca di sebuah instansi. Karena peraturan itu sangat penting dan bisa berakibat fatal jika pegawainya tidak mengetahui peraturan yang berlaku di instansinya, dengan mengadakan evaluasi antara pimpinan dan pegawai itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari setiap *person*.
4. Lupa dengan Aturan
Pendampingan dari auditor sangat penting agar segala sesuatunya berjalan dengan lurus sesuai dengan aturan yang ada. Pendampingan dapat memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi, meningkatkan disiplin pegawai agar tidak lupa dengan aturan, meningkatkan pelayanan sosial dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai optimalisasi peran auditor Internal melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kinerja keuangan di Instansi Perwakilan BKKBN DIY sudah cukup optimal.

1. Pelaksanaan GCG di Perwakilan BKKBN DIY tidak terlepas dari lima prinsipnya yaitu *transparency*, *accountability*, *independency*, *responsibility*, dan *fairness*. Untuk pedoman GCG ada dua instrumen yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK), SPIP diterapkan di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2009 yang merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah mempunyai lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Sedangkan ZIWBK diterapkan di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2012, tujuannya untuk mencegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan meningkatkan pelayanan publik.

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

2. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peran auditor ada dua yaitu sebagai *quality assurance* dan konsultan. Auditor sebagai *quality assurance* artinya setiap langkah kegiatan audit yang dilakukan akan bermuara pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen audit akan merasa puas apabila produk jasa audit yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Audit internal sebagai konsultan dalam suatu organisasi agar setiap permasalahan yang ada di komponen-komponen auditor bisa menjadi pendamping untuk memberikan solusi, dan diharapkan dapat memberi manfaat berupa nasehat (*advice*).
3. Dalam penerapan GCG di Instansi Perwakilan BKKBN DIY tidak lepas dari yang namanya hambatan. Di Perwakilan BKKBN DIY ada beberapa hambatan dalam mengoptimalkan GCG diantaranya koordinasi dan komunikasi, komitmen, kurang membaca peraturan, kurangnya pendidikan dan pelatihan (Diklat), dan lupa aturan.

Keberhasilan penelitian ini membutuhkan banyak motivasi dan bantuan dari banyak pihak dan peneliti bersyukur bisa menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sangat berterima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa mereka sebutkan satu per satu dan yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada tim Auditor, Latbang dan Bendahara Pengeluaran Perwakilan BKKBN DIY karena telah membantu dalam proses pengambilan data peneliti. Akhirnya, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Amri, Saiful., Haryono, Tri, Andi., & Warso, Mukery. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal of Management*, 2 (2): 2.
- Andypratama, L., & Mustamu, Ronny. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga. *Jurnal Agora*, 1(1): 5.
- Chinn, Richard. 2000. *Corporate Governance Handbook*. London: Gee Publishing Ltd.
- Delmana, P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dalam E-Purchasing untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1): 52.
- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Eke., Akpanuko., et all. (2019). Corporate Governance and Profitability of Quoted Oil and Gas Companies in Nigeria. *Journal of Business and Management Review*, 7(8): 105.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: Alfabeta.
- Fitrah, Muh., Luthfiyah. 2017. *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hartono, Jogiyanto. 2018. *Strategi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Huberman, Miles., et all. 2014. *Qualitative Data Analysis*. New Delhi: Sage.

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1): 3.
- Kusumayani, Luh, N., dkk. (2019). The Ability of Good Corporate Governance in Moderating the Effects of Financial Distress on the Velocity of Publication of the Financial Statements. *Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5): 81.
- Luthan, Elvira., dkk. (2016). The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to Earnings Management Before and After IFRS Convergence. *Journal Social and Behavioral Sciences*, 219: 469.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPPF.
- Maulamin, T. (2018). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Transparansi*, 1(2): 263.
- Monks. 2011. *Corporate Governance*. United States: Wiley.
- Mustafa. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nopiani, Dian, K., Sulindawati, Emi, G., & Sujana, Edy. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan rakyat di Bali. *Jurnal Akuntansi*, 3(1): 2.
- Nopiani, Dian, K., Sulindawati, Emi, G., & Sujana, Edy. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan rakyat di Bali. *Jurnal Akuntansi*, 3(1): 5.
- Nwonyuku, Nnanna, K. (2016). Corporate Governance and Profitability of Listed Food and Beverages Firms in Nigeria. *Journal Industrial Engineering Letters*, 6(3): 60.
- Nwonyuku, Nnanna, K. (2016). Corporate Governance and Profitability of Listed Food and Beverages Firms in Nigeria. *Journal Industrial Engineering Letters*, 6(3): 82.
- Sanjaya, S., & Sugiarty, Yenny. (2016). Peran Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(1): 2.
- Sanjaya, S., & Sugiarty, Yenny. (2016). Peran Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(1): 4.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance & Good Corporate Governance 3 Edisi Revisi*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sudaryo, Yoyo., Sjarif, Devyanthi., Sofiati, A. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suryati, Adelina., Murwaningsari, Etty. (2019). The The Effect of Ligitation Risk and Investment Opportunity Set Affected by Good Corporate Governance on the Company's Earning Quality. *Journal of Finance and Accounting*, 10(22): 54.
- Tertius, Agustina, M., & Christiawan, Jogi, Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Jurnal Business Accounting*, 3(1): 224.
- Tertius, Agustina, M., & Christiawan, Jogi, Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Jurnal Business Accounting*, 3(1): 229.

Journal Competency of Business

2020 Vol 4. No II

Zamzami, Faiz., Faiz, Arifin, I., Mukhlis. 2013. *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.

<https://bpi.unair.ac.id/> Kode Etik Auditor (11 Desember 2020).

<https://inspektorat.jogjakota.go.id/> Pembangunan ZIWBK dan WBBM (10 Desember 2020).

<https://lamongankab.go.id/> Pengertian Tugas Fungsi Wewenang BKKBN (10 Desember 2020).

<https://pusdiklatwas.bkp.go.id/> Harmonisasi Wskat dengan SPIP.

<http://sumbar.bkkbn.go.id/> Sejarah BKKBN (10 Desember 2020).

<https://www.hestanto.web.id/> Kosep Good Corporate Governance (12 Desember 2020).

<https://itjen.kemkes.go.id/berita/> Implementasi Pengendalian Intern (27 Februari 2021)

<https://www.kajianpustaka.com/> Pengertian, Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan (13 Desember 2020).